

**PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019**

**BAB I
P E N D A H U L U A N**

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus mempunyai beberapa jenis perencanaan pembangunan, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Kualitas perencanaan pembangunan daerah dapat dilihat dari sejauh mana rencana yang dihasilkan seoptimal mungkin mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, selaras dengan tahapan perencanaan jangka menengah, serta mendukung pencapaian prioritas nasional dan provinsi.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan adalah dokumen perencanaan program kegiatan jangka 1 (satu) tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) yang terdiri dari RKPD, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah (PD).

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan tahun 2018-2023, dan merupakan tahun pertama dari periodisasi RPJMD yang disusun dengan memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, perkembangan kondisi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan masyarakat yang ada, isu strategis yang mungkin akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Renja Disnaker, serta penjangkaran aspirasi masyarakat, dengan pendekatan dalam perencanaan yaitu

Partisipatif, teknokratis, *Top-Down Planning* dan *Bottom-up Planning* serta politik.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 ayat (1) disebutkan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat diubah berdasar hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya sesuai permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada pasal 343 ayat (1) disebutkan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembang daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan Daerah.
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau;
- c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan Disnaker Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Triwulan I dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi : perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penambahan/ penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah, aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, serta proyeksi prioritas belanja, maka harus dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundangan.

Dari beberapa penjelasan di atas, maka perlu dilaksanakan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan Tahun 2019 untuk menampung seluruh perubahan yang terjadi karena perubahan asumsi makro ekonomi daerah yang berimbas pada stuktur

APBD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD induk Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan kondisi tersebut, Disnaker Kabupaten Magetan dapat melakukan pergeseran pagu antar kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan dalam Perubahan RKPD tahun 2019.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lemaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

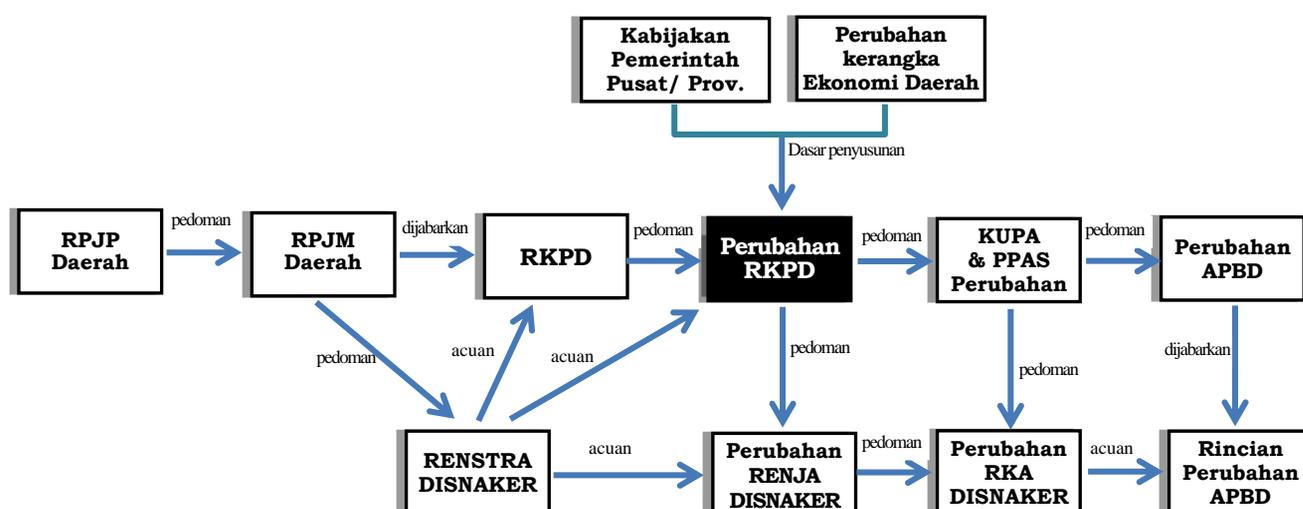
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 824);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, (Berita Negara Tahun 2017 Nomor);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tim Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 30 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magean tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Magetan ahun 2018 Nomor 30);
17. Peraturan Bupati Nomor 61 tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan TA. 2019.
18. Peraturan Bupati Nomor 16 tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 nomor 16).

19. Peraturan Bupati Nomor 32 tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Magetan Tahun 2019.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sebagai suatu produk perencanaan, dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Secara fungsional Perubahan Renja disebabkan karena adanya perubahan asumsi-asumsi penganggaran dan target kinerja, penyesuaian kegiatan, maupun penyesuaian dengan kebijakan Pemerintah Pusat atau Provinsi. Secara diagramatis keterkaitan hubungan dokumen Perubahan Renja Disnaker dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

GAMBAR 1.1
KETERKAITAN ANTARA PERUBAHAN RENJA DISNAKER
DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN LAINNYA



Mengacu pada gambar diatas, dapat dijelaskan secara rinci hubungan dokumen Perubahan Renja Disnaker dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

- Renja Disnaker disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD yang didalamnya memuat mengenai visi, misi dan arah kebijakan pembangunan daerah;
- Perubahan Renja Disnaker disusun dengan berpedoman pada RKPD induk dengan beberapa penyesuaian karena perkembangan perubahan kondisi asumsi penganggaran dan target kinerja;

- Perubahan Renja Disnaker disusun dengan memperhatikan dan mengacu Renstra Disnaker, terkait program dan kegiatan serta target capaian kinerja;
- Perubahan RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Perubahan Renja Disnaker yang disusun terkait program dan kegiatan, capaian kinerja dan pagu anggaran;
- Selanjutnya Perubahan RKPD dijadikan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Renja Disnaker Tahun 2019 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Disnaker Kabupaten Magetan tahun 2018-2023 secara berkesinambungan.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Disnaker Tahun 2019 adalah untuk :

1. Memberikan arah kebijakan tentang gambaran pelaksanaan tugas-tugas Perangkat Daerah serta indikator atau ukuran keberhasilan program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019;
2. Memberikan arah atau acuan dalam penyusunan program/kegiatan pembangunan ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis (Renstra) dengan tujuan perencanaan dan penganggaran program /kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan;

1.5 Sistematika Penyajian

Sebagaimana ketentuan pada pasal 348 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan jangka panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana kerja Pemerintah

Daerah, maka sistematika penyajian Perubahan Renja Kab. Magetan tahun 2019 disusun sebagai berikut :

TABEL 1.1
TABEL SISTEMATIKA PERUBAHAN RENJA DINAS TENAGA KERJA
KAB. MAGETAN TAHUN 2019

BAB I PENDAHULUAN		
1.1.	Latar Belakang	Dasar pertimbangan perlunya dilakukan perubahan Renja Disnaker yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah (gambaran struktur perubahan APBD)
1.2	Landasan Hukum	Uraian ringkas tentang dasar hukum yang berkaitan langsung dan digunakan dasar dalam penyusunan Perubahan Renja, baik yang berskala nasional, maupun lokal.
1.3.	Hubungan antar Dokumen	Hubungan Perubahan Renja dengan dokumen lain yang relevan (Perubahan Renja SKPD, KUPA dan PPAS Perubahan, serta Rancangan Perubahan APBD) beserta penjelasannya.
1.4	Maksud dan Tujuan	Berisi tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan Renja.
1.5	Sistematika Dokumen Renja	Berisi tentang sistematika penyajian/ penyusunan Perubahan Renja
BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN		
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Disnaker sampai tahun berjalan, memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya sampai dengan Tahun berjalan sampai dengan triwulan II. (kompilasi hasil capaian target kinerja Renja PD dengan target Renstra).		
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		
Memuat pergeseran/ perubahan pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan (baik yang dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan).		
BAB IV PENUTUP		
Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan.		

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN BERKENAAN

Evaluasi kinerja program dan kegiatan terhadap pelaksanaan realisasi kinerja dan realisasi anggaran yang dilakukan per triwulan sangat penting dilaksanakan sebagai upaya dalam memaksimalkan pencapaian target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan didalam Renja Disnaker Tahun 2019. Memperhatikan tahapan dan tata waktu dalam rangka penyusunan Perubahan Renja Disnaker Tahun 2019, maka kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja Disnaker Tahun 2019 menggunakan laporan realisasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II tahun berjalan. Hasil evaluasi tersebut merupakan data sekaligus informasi terkait pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan dalam Renja dan teranggarkan pada APBD Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019. Menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut akan teraplikasi dalam perubahan rencana program dan kegiatan dalam Perubahan Renja Tahun 2019 serta menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Evaluasi Renja Disnaker tahun 2019 sampai dengan triwulan II dilakukan melalui analisa capaian program dan kegiatan. Capaian indikator capaian dihitung dengan membandingkan capaian pada triwulan I program dan kegiatan tahun 2019 pada Dinas Tenaga Kerja dengan capaian yang harus dicapai pada Renja tahun 2019 dalam satuan persentase, dikompilasi dengan target akhir capaian Renstra Disnaker.

Adapun hasil evaluasi program dan kegiatan Renja Disnaker sampai dengan Triwulan II tahun berjalan adalah sebagai berikut :

		dan Kegiatan (output)							I			II						Anggaran Renja yang dievaluasi (%)					Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)			
			Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Vol	Rp	Volume	Satuan	Rp	Vol	Rp		
1.1.2.4	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	jumlah peserta penyuluhan dan sosialisasi produktivitas	250	kube	370.000.000		orang	50	orang	30.000.000	-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.2.5	Kerjasama pendidikan dan pelatihan	Jumlah peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi	160	orang	4.160.000.000		orang	-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-	-	orang	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-	
1.1.3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan	100		1.845.000.000			100		280.000.000			11.344.550			126.497.300										
1.1.3.1	Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	Persentase kasus ketenagakerjaan pekerja migran Indonesia (PMI) yang tertangani	100	%	215.000.000		%	100	%	30.000.000	29	%	4.880.500	29	%	10.593.000	57	%	15.473.500	57	52	57	57	15.473.500	57	7
1.1.3.2	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	jumlah peserta kegiatan sosialisasi UMK dan bimtek peraturan ketenagakerjaan	690	orang	455.000.000		orang	90	orang	75.000.000	-	orang	4.727.250	-	orang	12.532.250	-	orang	17.259.500	-	23	-	-	17.259.500	-	4
1.1.3.3	Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah	jumlah pelaksanaan peringatan hari buruh internasional	5	kali	875.000.000		kali	1	kali	125.000.000	-	kali	-	1	kali	80.447.900	1	kali	80.447.900	100	64	1	100	80.447.900	20	9
1.1.3.4	Pemantauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja	Jumlah perusahaan pengarah tenaga kerja yang dibina	15	perusahaan	145.000.000		perusahaan	3	perusahaan	25.000.000	-	perusahaan	-	1	perusahaan	3.433.600	1	perusahaan	3.433.600	33	14	1	33	3.433.600	7	2
1.1.3.5	Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Persentase kasus hubungan industrial yang tertangani	100	%	155.000.000		%	100	%	25.000.000	60	%	1.736.800	40	%	8.156.000	100	%	9.892.800	100	40	100	100	9.892.800	100	6
Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu			Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2019 yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)	
											I			II												

			Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Vol	Rp	Volume	Satuan	Rp	Vol	Rp
1.1.4	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat dan kewirausahaan serta mendapatkan pekerjaan	30		6.950.000.000				20		950.000.000			67.554.400			272.629.250										
1.1.4.1	Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja	jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui fasilitasi penempatan dan penyelenggaraan pameran kesempatan kerja (Job fair)	7500	orang	2.160.000.000		orang		1.500	orang	400.000.000	-	orang	-	2.300	orang	11.490.750	2.300	orang	11.490.750	153	3	2.300	153	11.490.750	31	1
1.1.4.2	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	jumlah tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan kompetensi kerja	1040	orang	4.790.000.000		orang		140	orang	550.000.000	20	orang	67.554.400	60	orang	193.584.100	80	orang	261.138.500	57	47	80	57	261.138.500	8	5
1.2.1	Program pengembangan wilayah transmigrasi	persentase penempatan transmigran yang terseleksi dan terlatih	100		5.370.000.000				100		280.000.000			53.923.750			111.148.800										
1.2.1.1	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	jumlah dokumen kerjasama antar daerah (KSAD) dengan Pemkab Magetan	10	dokumen	3.250.000.000		dokumen		2	dokumen	50.000.000	-	dokumen	25.974.400	-	dokumen	2.850.000	-	dokumen	28.824.400	-	58	-	-	28.824.400	-	1
1.2.1.2	Sosialisasi Daerah Penempatan Transmigrasi	jumlah peserta sosialisasi daerah penempatan transmigrasi	250	orang	270.000.000		orang		50	orang	40.000.000	50	orang	17.656.850	-	orang	8.903.700	50	orang	26.560.550	100	66	50	100	26.560.550	20	10
Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu			Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2019 yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)	
												I		II													

			Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Vol	Rp	Volume	Satuan	Rp	Vol	Rp
1.2.1.3	Pendaftaran, Seleksi, dan Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Calon Transmigran	jumlah calon transmigran yang terseleksi dan mendapat pelatihan	50	KK	300.000.000		KK		10	KK	40.000.000	-	KK	2.150.000	15	KK	32.305.350	15	KK	34.455.350	150	86	15	150	34.455.350	30	11
1.2.1.4	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	jumlah calon transmigran yang diberangkatkan dan menerima bantuan	50	KK	1.550.000.000		KK		10	KK	150.000.000	-	KK	8.142.500	-	KK	13.166.000	-	KK	21.308.500	-	14	-	-	21.308.500	-	1
1.1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat	100		3.745.000.000				100		560.000.000			85.112.289			213.955.480										
1.1.1.1	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	12	bulan	1.845.000.000		bulan		12	bulan	270.000.000	3	bulan	59.640.349	3	bulan	64.036.041	6	bulan	123.676.390	50	46	6	50	123.676.390	10	7
1.1.1.2	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	jumlah penyediaan pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	60	bulan	1.770.000.000		bulan		12	bulan	270.000.000	3	bulan	25.471.940	3	bulan	64.807.150	6	bulan	90.279.090	50	33	6	50	90.279.090	10	5
1.1.1.3	Survey Kepuasan masyarakat	jumlah dokumen survey kepuasan masyarakat	5	dokumen	130.000.000		dokumen		1	dokumen	20.000.000	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	100		1.340.000.000				100		150.000.000			43.186.200			66.079.500										
2.1.2.1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	70	unit	350.000.000		unit		14	unit	50.000.000	5	unit	15.296.200	4	unit	7.979.360	9	unit	23.275.560	64	47	9	64	23.275.560	13	7
Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2018 s/d 2023 (periode Renstra SKPD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu			Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Tahun 2019 yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD)			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (%)	
			Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Volume	Satuan	Rp	Vol	Rp	Volume	Satuan	Rp	Vol	Rp

2.1.2.2	Pengadaan Perengkapan Kantor	jumlah pengadaan perlengkapan kantor	27	paket	340.000.000		paket	3	paket	30.000.000	2	paket	23.040.000	1	paket	6.260.000	3	paket	29.300.000	100	98	3	100	29.300.000	11	9
2.1.2.3	Pemeliharaan Perengkapan Kantor	jumlah pemeliharaan perlengkapan kantor	60	bulan	310.000.000		bulan	12	bulan	20.000.000	3	bulan	4.850.000	3	bulan	6.674.000	6	bulan	11.524.000	50	58	6	50	11.524.000	10	4
2.1.2.4	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	jumlah rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor	10	paket	340.000.000		paket	2	paket	50.000.000	-	paket	-	1	paket	1.980.000	1	paket	1.980.000	50	4	1	50	1.980.000	10	1
3.1.3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan	100		200.000.000			100		20.000.000			4.500.000			5.750.000										
3.1.3.1	Pendidikan dan pelatihan formal	jumlah aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal	29	orang	200.000.000		orang	5	orang	20.000.000	2	orang	4.500.000	-	orang	1.250.000	2	orang	5.750.000	40	29	2	40	5.750.000	7	3
4.1.4	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100		295.000.000			100		25.000.000			2.793.000			14.537.750										
4.1.4.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun dokumen	50	dokumen	295.000.000		dokumen	10	dokumen	25.000.000	4	dokumen	2.793.000	3	dokumen	11.744.750	7	dokumen	14.537.750	70	58	7	70	14.537.750	14	5

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan prioritas program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Magetan mengacu pada arah dan kebijakan pembangunan nasional, mengacu pada kondisi umum daerah Kabupaten Magetan, regional, propinsi maupun nasional yang dihadapi, termasuk adanya masalah mendesak yang perlu segera diatasi, serta penyesuaian dengan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki terutama sumberdaya finansial. Penyusunan perencanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Disnaker Kabupaten Magetan Tahun 2019 disusun berdasarkan acuan yang ada dalam RPJMD dengan memperhatikan usulan yang telah melalui pembahasan melibatkan berbagai pihak, kemudian diselaraskan dengan program/kegiatan dari Disnaker untuk pencapaian tujuan dan sasaran.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja (Renja Disnaker) tahun 2019 tetap mengacu pada Renstra tahun 2018, yang merupakan tahun pertama dari periodisasi RPJMD Kabupaten Magetan tahun 2018 – 2023, sebagaimana tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kab. Magetan tahun 2018-2023.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja (Renja Disnaker) Tahun 2019 memerlukan fokus dan arah kebijakan pembangunan yang jelas, agar dalam pelaksanaannya dapat lebih terarah, tepat sasaran, efektif, efisien dan memiliki fokus tujuan sehingga hasil yang dicita-citakan dapat lebih mudah dicapai. Kebijakan umum belanja yang ditetapkan dalam Perubahan Renja Disnaker Kabupaten Magetan Tahun 2019 adalah usulan program dan kegiatan harus bersifat mendesak dan prioritas serta menunjang kelancaran pelaksanaan tupoksi Dinas Tenaga Kerja kabupaten Magetan, memacu pencapaian target capaian kinerja dan pencapaian target RPJMD, mencukupi belanja wajib/ prioritas yang belum teranggarkan dalam APBD induk 2019, penyesuaian terhadap program/kegiatan Kabupaten yang merupakan kebijakan dari pemerintah Pusat dan Provinsi, serta mempertimbangkan kecukupan sisa waktu dari pelaksanaan Perubahan APBD tahun 2019. Juga yang paling penting adalah mempertimbangkan ketersediaan anggaran dalam struktur Perubahan APBD tahun 2019.

Program dan kegiatan prioritas dalam Perubahan Renja Disnaker tahun 2019 tetap mengacu pada Program prioritas RPJMD 2018-2023 dan Renstra tahun 2018 dengan penyesuaian sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Selanjutnya, program dan kegiatan pada Perubahan Renja Disnaker Kab. Magetan Tahun 2018 secara rinci dan lebih lengkap dapat kita lihat dari tabel dibawah ini :

**RENCANA PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS DAN PAGU INDIKATIF
PERUBAHAN RENJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2019							PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2020		KETR
				TARGET CAPAIAN KINERJA		LOKASI		PAGU INDIKATIF (Rp)			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / BERKURANG			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar						2.820.000.000	2.670.000.000	-150.000.000			
	2.01	Tenaga Kerja [2010101] DINAS TENAGA KERJA						2.820.000.000	2.670.000.000	-150.000.000			
	2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indek kepuasan masyarakat	- Angka	79,50 Angka			560.000.000	560.000.000	0			
1	2.01.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan jasa pelayanan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	270.000.000	270.000.000	0	0 bulan		
2	2.01.01.021	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumlah penyediaan pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar daerah	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	270.000.000	270.000.000	0	0 bulan		
3	2.01.01.022	Survey Kepuasan masyarakat	Jumlah dokumen survey kepuasan masyarakat	1 dokumen	1 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	20.000.000	0	0 dokumen		

	2.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang layak fungsi	100 persen	100 persen			150.000.000	150.000.000	0			
4	2.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas /operasional	14 unit	14 unit	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	50.000.000	0	0 unit		
5	2.01.02.045	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	3 paket	3 paket	Kabupaten	Kabupaten	30.000.000	30.000.000	0	0 paket		DID
6	2.01.02.046	Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	12 bulan	12 bulan	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	20.000.000	0	0 bulan		
7	2.01.02.047	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor	2 paket	2 paket	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000	50.000.000	0	0 paket		
	2.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan	100 persen	100 persen			20.000.000	20.000.000	0			
8	2.01.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mendapat pendidikan dan pelatihan formal	5 orang	5 orang	Kabupaten	Kabupaten	20.000.000	20.000.000	0	0 orang		
	2.01.07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100 persen	100 persen			25.000.000	25.000.000	0			
9	2.01.07.002	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disusun	10 Dokumen	10 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	25.000.000	25.000.000	0	0 Dokumen		

	2.01.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan pelatihan yang memiliki sertifikat keterampilan/kompetensi	100 persen	100 persen			675.000.000	225.000.000	-450.000.000			
10	2.01.15.001	Penyusunan data base tenaga kerja daerah	Jumlah dokumen ketenagakerjaan daerah	1 dokumen	1 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	175.000.000.00	175.000.000.00	0	0 dokumen		
11	2.01.15.003	Pengadaan peralatan pendidikan dan ketrampilan bagi pencari kerja	Jumlah peralatan dan perlengkapan praktek pelatihan kerja	10 unit	10 unit	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000.00	0.00	-100.000.000	0 unit		
12	2.01.15.006	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang mendapat pembinaan	15 lembaga	15 lembaga	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000.00	50.000.000.00	0	0 lembaga		
13	2.01.15.011	Pengembangan sarana dan prasarana peningkatan kualitas tenaga kerja	; terlaksananya pembangunan BLK	4 ; 0	4 ; 0	Kabupaten	Kabupaten	350.000.000.00	0.00	-350.000.000	0 ; 0		
	2.01.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja terlatih yang ditempatkan	3 Persen	20 Persen			160.000.000.00	160.000.000.00	0			
14	2.01.16.001	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah Dokumen Penempatan Tenaga Kerja	12 Dokumen	12 Dokumen	Kabupaten	Kabupaten	30.000.000.00	30.000.000.00	0	0 Dokumen		
15	2.01.16.002	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	Jumlah Peserta Sosialisasi Penempatan Tenaga Kerja	160 orang	160 orang	Kabupaten	Kabupaten	100.000.000.00	100.000.000.00	0	0 orang		
16	2.01.16.005	Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan	Jumlah peserta penyuluhan dan sosialisasi produktivitas	50 orang	50 orang	Kabupaten	Kabupaten	30.000.000.00	30.000.000.00	0	0 orang		

	2.01.17	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase penyelesaian perselisihan kasus ketenagakerjaan	100 persen	100 persen			280.000.000.00	280.000.000.00	0			
17	2.01.17.001	Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja	Persentase kasus ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang tertangani	100 persen	100 persen	Kabupaten	Kabupaten	30.000.000.00	30000.000.00	0	0 persen		
18	2.01.17.002	Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Persentase kasus hubungan industrial yang tertangani	100 persen	100 persen	Kabupaten	Kabupaten	25.000.000.00	25.000.000.00	0	0 persen		
19	2.01.17.004	Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan	Jumlah peserta kegiatan sosialisasi UMK dan bimtek peraturan ketenagakerjaan	90 orang	90 orang	Kabupaten	Kabupaten	75.000.000.00	75.000.000.00	0	0 orang		
20	2.01.17.010	Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah	Jumlah Pelaksanaan Peringatan hari Buruh Internasional	1 Kali	1 Kali	Kabupaten	Kabupaten	125.000.000.00	125.000.000.00	0	0 Kali		
21	2.01.17.012	Pemantauan Kinerja Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	jumlah perusahaan pengarah tenaga kerja yang dibina	3 perusahaan	3 perusahaan	Kabupaten	Kabupaten	25.000.000.00	25.000.000.00	0	0 perusahaan		
	2.01.53	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi, masyarakat, dan kewirausahaan serta mendapat pekerjaan	100 persen	20 persen			950.000.000.00	1.250.000.000.00	300.000.000			
22	2.01.53.019	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	jumlah tenaga kerja yang memiliki ketrampilan dan kompetensi kerja	140 orang	215 orang	Kabupaten	Kabupaten	550.000.000.00	850.000.000.00	300.000.000	0 orang		DBHCHT
23	2.01.53.022	Pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja bagi pencari kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui fasilitasi penempatan dan penyelenggaraan pameran kesempatan kerja (Job fair)	1500 Org	1500 Org	Kabupaten	Kabupaten	400.000.000.00	400.000.000.00	0	0 Org		DBHCHT

	3	Urusan Pilihan						280.000.000.00	445.808.800.00	165.808.800			
	3.08	Transmigrasi [2010101] DINAS TENAGA KERJA						280.000.000.00	445.808.800.00	165.808.800			
	3.08.15	Program pengembangan wilayah transmigrasi	Persentase penempatan transmigran yang terseleksi dan terlatih	10 persen	100 persen			280.000.000.00	445.808.800.00	165.808.800			
24	3.08.15.002	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi	Jumlah dokumen kerjasama anta daerah (KSAD) dengan Pemkab. Magetan	2 dokumen	2 dokumen	Kabupaten	Kabupaten	50.000.000.00	50.000.000.00	0	0 dokumen		
25	3.08.15.005	Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhan SDM	Jumlah calon Transmigran yang diberangkatkan dan menerima bantuan	10 KK	15 KK	Kabupaten	Kabupaten	150.000.000.00	315.808.800.00	165.808.800	0 KK		
26	3.08.15.006	Sosialisasi Daerah Penempatan Transmigrasi	jumlah peserta sosialisasi daerah penempatan transmigrasi	50 orang	50 orang	Kabupaten	Kabupaten	40.000.000.00	40.000.000.00	0	0 orang		
27	3.08.15.008	Pendaftaran, Seleksi, dan Pelatihan Peningkatan Ketrampilan Calon Transmigran	jumlah calon transmigran yang terseleksi dan mendapat pelatihan	10 KK	10 KK	Kabupaten	Kabupaten	40.000.000.00	40.000.000.00	0	0 KK		
TOTAL								3.100.000.000	3.115.808.800	15.808.800	0		

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Disnaker Kabupaten Magetan Tahun 2019 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023. Perubahan Renja Disnaker Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan tahun berjalan serta rencana perubahan program dan kegiatan pada tahun 2019.

Perubahan Renja Disnaker Kabupaten Magetan Tahun 2019 sebagai dokumen rencana operasional pelaksanaan program/kegiatan tahun 2019. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka perlu dirumuskan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perubahan Renja Disnaker Tahun 2019 sebagai acuan penyusunan anggaran program kegiatan Disnaker Kabupaten Magetan Tahun 2019;
2. Perubahan Renja disnaker Tahun 2019 menjadi landasan dalam pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Disnaker Kabupaten Magetan.

Selanjutnya, dokumen ini dapat memberikan landasan berpijak dalam menyusun anggaran dan melaksanakan program kegiatan Disnaker Kabupaten Magetan.

Magetan, 31 Juli 2019

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kabupaten Magetan



Ir. S U Y A D I, M.MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19590816 198403 1 010